PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
Jl. Pelabuhan Batubi No.01 - Batubi Jaya, Natuna, Kepulauan Riau 29752B1
Pos.el : bunguranbatubi@yahoo.com

GAMBARAN KONDISI WILAYAH SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN SKP.B KECAMATAN BUNGURAN BATUBI TAHUN 2026

Desa Batubi Jaya • Desa Gunung Putri • Desa Sedarat Baru
Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau

Disusun sebagai bahan profil wilayah, perencanaan pengembangan kawasan, dan pemutakhiran data spasial serta nonspasial

Catatan :
Dokumen ini disusun berdasarkan sekilas kondisi lapangan saat ini sebagai Gambaran tentang kondisi di wilayah SKP.B Kecamatan Bunguran Batubi dan juga mengacu pada Dokumen RKT, Rencana Penggunaan Lahan dan Kabupaten Natuna dalam Angka Tahun 2025. Dan bila ada yang lebih sesuai dan detail dapat ditambahkan atau di update atau dikonfirmasikan untuk perbaikan.

DOKUMEN GAMBARAN KONDISI WILAYAH
SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN SKP. B BUNGURAN BATUBI

SP.1 Desa Batubi Jaya • SP.2 Desa Gunung Putri • SP.3 Desa Sedarat Baru
Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau

Disusun sebagai bahan profil wilayah, perencanaan pengembangan kawasan, dan pemutakhiran data spasial serta nonspasial

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2026

Disusun Oleh : Kartono, SE
Kepala Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial

Peserta PKA XII BPSDM Kepri Tahun 2026

Catatan :
Dokumen ini disusun berdasarkan sekilas kondisi lapangan saat ini sebagai Gambaran tentang kondisi di wilayah SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah dan juga mengacu pada Dokumen RKT, Rencana Penggunaan Lahan dan Kabupaten Natuna dalam Angka Tahun 2025. Dan bila ada yang lebih sesuai dan detail dapat ditambahkan atau di update atau dikonfirmasikan untuk perbaikan

RINGKASAN EKSEKUTIF

SKP.B Bunguran Batubi merupakan kawasan eks permukiman transmigrasi yang dalam dokumen Rencana Penggunaan Lahan Usaha II Transmigran terdiri atas SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung Putri, dan SP.3 Desa Sedarat Baru. Dokumen sumber mencatat luas gabungan wilayah SKP.B sekitar 5.640,12 ha, dengan peruntukan lahan pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II, aset transmigrasi, serta ruang untuk jalan, sungai, konservasi, ketahanan pangan, lahan restan dan ruang terbuka hijau.

Secara umum, dokumen sumber menggambarkan topografi lokasi transmigrasi relatif datar hingga landai, dengan kemiringan umum sekitar 0–10 persen; beberapa lokasi spesifik memiliki kemiringan 8–15 persen. Landform yang disebut adalah dataran vulkan dan dataran aluvial, dengan bahan induk berupa basal dan gabro pada lokasi tertentu, serta endapan liat, pasir dan bahan organik pada lokasi aluvial.

Kawasan direncanakan untuk mendukung pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan kegiatan industri yang sesuai dengan tata ruang. Desa Batubi Jaya diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan (PPK), dengan Desa Gunung Putri dan Sedarat Baru mendukung pengembangan kawasan. Dokumen sumber juga mencatat lahan ketahanan pangan di Desa Gunung Putri sekitar 169 ha, dengan sekitar 40 ha disebut telah dimanfaatkan untuk padi, palawija dan sayuran pada saat dokumen disusun.

Terdapat persoalan penting yang perlu diverifikasi sebelum dokumen dijadikan dasar keputusan: perbedaan angka luas yang disebut untuk pencadangan/pelepasan HPK, jumlah bidang Lahan Usaha II dalam APL dan HPK, serta jumlah luasan empat lokasi pada tabel teknis. Dokumen ini mempertahankan angka sebagaimana dicatat sumber dan menandai perbedaan tersebut, bukan menyatukannya secara asumtif.

DAFTAR ISI

- BAB I. Pendahuluan dan Metodologi
- BAB II. Profil dan Sejarah SKP.B Bunguran Batubi
- BAB III. Kondisi Geografis dan Administratif
- BAB IV. Topografi, Geologi, Landform, dan Kondisi Tanah
- BAB V. Iklim, Hidrologi, dan Sumber Daya Air
- BAB VI. Penggunaan Lahan dan Status Penguasaan Tanah
- BAB VII. Kependudukan, Sosial, dan Ekonomi
- BAB VIII. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan
- BAB IX. Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas
- BAB X. Potensi, Permasalahan, dan Risiko
- BAB XI. Arahan Pengembangan dan Rekomendasi
- BAB XII. Data yang Perlu Dilengkapi dan Diverifikasi
- Daftar Sumber

BAB I. PENDAHULUAN DAN METODOLOGI

1.1. Latar Belakang

Informasi yang lengkap mengenai kondisi geografis, bentuk lahan, jenis tanah, sumber daya air, penggunaan lahan, status penguasaan, kependudukan, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur merupakan dasar untuk menyusun program pembangunan kawasan transmigrasi. Profil SKP.B diperlukan untuk menyatukan informasi yang tersebar dalam dokumen perencanaan dan catatan sektoral sehingga dapat digunakan untuk penentuan prioritas, pemantauan, pengelolaan aset, dan pengembangan usaha masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen adalah menyediakan profil awal kondisi wilayah SKP.B Bunguran Batubi berdasarkan dokumen yang tersedia. Tujuannya:

1. Menguraikan sejarah dan cakupan tiga satuan permukiman transmigrasi.
2. Menyajikan informasi geografis, topografi, geologi, landform, jenis tanah dan kemiringan lahan.
3. Menginventarisasi informasi penggunaan lahan, Lahan Usaha I dan II, lahan aset serta isu status tanah.
4. Mengidentifikasi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan.
5. Menyusun daftar kebutuhan data teknis yang harus divalidasi dan diperbarui.

1.3. Ruang Lingkup

Dokumen mencakup SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung Putri, dan SP.3 Desa Sedarat Baru dalam SKP.B Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna. Informasi yang bersifat regional atau berasal dari dokumen rencana penggunaan lahan untuk blok tertentu dinyatakan sesuai cakupan sumbernya dan tidak otomatis berlaku bagi seluruh desa atau setiap bidang.

1.4. Sumber dan Batasan Data

- Dokumen utama: Rencana Penggunaan Lahan Usaha II Transmigran SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3, Kabupaten Natuna, kegiatan penatausahaan pencadangan tanah untuk pelepasan kawasan hutan HPK tahun 2024; dokumen memuat data historis dan lampiran teknis dari instansi terkait.
- Sumber statistik tambahan: Kecamatan Bunguran Batubi Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
- Informasi jenis tanah dan kemiringan yang tersedia terutama mengacu pada lokasi Lahan Usaha II; tidak dianggap sebagai hasil survei tanah per bidang.

- Data penduduk, iklim bulanan, kondisi infrastruktur terkini, dan status sertifikasi harus diperbarui dari instansi berwenang sebelum penetapan dokumen final.

BAB II. PROFIL DAN SEJARAH SKP.B BUNGURAN BATUBI

2.1. Wilayah dan Satuan Permukiman

No.	Satuan Permukiman	Desa	Keterangan
1	SP.1	Batubi Jaya	Dalam dokumen diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan (PPK).
2	SP.2	Gunung Putri	Mendukung pengembangan budidaya dan ketahanan pangan.
3	SP.3	Sedarat Baru	Mendukung pengembangan kawasan budidaya.

2.2. Luas Wilayah dan Peruntukan Dasar

Dokumen sumber mencatat luas keseluruhan SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3 sekitar 5.640,12 ha. Rekap peruntukan lahan yang dicantumkan meliputi lahan pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II dan lahan aset transmigrasi.

Komponen	Angka dalam dokumen sumber	Catatan
Luas gabungan wilayah SKP.B	± 5.640,12 ha	Angka menurut dokumen perencanaan.
Lahan pekarangan	530 ha	1.060 KK × 0,5 ha/KK menurut dokumen.
Lahan Usaha I	1.060 ha	1.060 KK × 1 ha/KK menurut dokumen.
Lahan Usaha II	2.120 ha	1.060 bidang × 2 ha/bidang menurut rekap peruntukan.
Lahan aset transmigrasi	197 ha	Rincian desa dalam rekap sumber: 73 ha, 68 ha, dan 56 ha.
Total komponen tersebut	3.906,55 ha	Angka total rekap sumber; angka antarbaris dibaca sesuai tabel asli.
Sisa lahan menurut dokumen	1.733,57 ha	Disebut mencakup jalan, sungai, konservasi, lahan ketahanan pangan, restan, dan ruang terbuka hijau.

2.3. Riwayat dan Pembinaan Kawasan

Dokumen menggambarkan SKP.B sebagai kawasan eks transmigrasi yang berkembang melalui tiga satuan permukiman. Setiap keluarga transmigran direncanakan memperoleh lahan pekarangan sekitar 0,5 ha, Lahan Usaha I sekitar 1 ha, dan Lahan Usaha II sekitar 2 ha. Dokumen menyebut lahan pekarangan dan Lahan Usaha I telah bersertifikat pada saat pembinaan berakhir tahun 2009, sedangkan proses sertifikasi Lahan Usaha II mulai dilakukan pada 2019. Status masing-masing bidang saat ini tetap harus diperiksa melalui data resmi pertanahan ntuk penyelesaian sertifikat Hak Milik Transmigran yang belum terselesaikan karena belum terselesaikannya pelepasan Kawasan hutan HPK seluas 1.461 Ha untuk Lahan Usaha II sebanyak 593 Bidang.

2.4. Konteks Administratif

Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Natuna dilanjutkan kembali Pada tahun 1990 diawali dengan melakukan survey RTSP pada Rencana Satuan Kawasan Pengembangan SKP.B Batubi dan sekarang menjadi Kecamatan Bunguran Batubi. Tahapan survey Rencana Sarana dan Prasarana (Sarpras) dilaksanakan pada tahun 1991 yang kemudian dilanjutkan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana SKP. B Batubi dengan jumlah 3 SP dilaksanakan selama 3 Tahun secara bertahap mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, kemudian penempatan Transmigran berasal dari Daerah lain dan pendamping dari daerah asal sebanyak 1.060 KK dilaksanakan di 3 SP secara bertahap mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 dengan jumlah transmigran yang ditempatkan sebagai berikut :

1. SP.1 (Desa Batubi Jaya) 465 KK, Penempatan tahun 1995-1996
2. SP.2 (Desa Gunung Putri) 345 KK Penempatan tahun 1996-1997
3. SP.3 (Desa Sedarat Baru) 250 KK. Penempatan tahun 1996-1997

Setelah pembinaannya selama 5 tahun sampai tahun 1999 dengan pola Trans-Bun (Tansmigrasi Perkebunan) maka serah terima pembinaan dilaksanakan pada tahun 1999 menjadi desa Definitif sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sedangkan Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009, sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.275/MEN/IX/2009 sebanyak 156 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) seluruh Indonesia termasuk Trans Batubi.

SKP.B kecamatan Bunguran Batubi SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung Putri dan SP.3 Desa Sedarat Baru menjadi Kecamatan Bunguran Batubi atas Pemekaran

dari Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2014 Berdasarkan **Perda Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014** terdiri dari 3 Desa Eks Transmigrasi, 1 Desa induk dan 1 Desa Pemekaran dari Desa Induk Sedana Timur.

BAB III. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

3.1. Letak Wilayah

Secara administrasi Kecamatan Bunguran Batubi terdiri dari 5 Desa diantaranaya 2 Desa sebagai desa Induk yaitu Desa Sedanau Timur dan Desa Semedang Pemekaran dari Desa Induk, sedangkan 3 Desa yang berada dalam HPL Transmigrasi merupakan desa Eks. Transmigrai yaitu SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung Putri dan Desa Sedarat Baru dengan jumlah penduduk 3.882 jiwa. Adapun batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut

Sebelah Selatan : Kecamatan Bunguran Barat

Sebelah Barat : Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Bunguran Tengah

Luas wilayah kecamatan Bunguran Batubi secara keseluruhan tercatat sebesar 214,81 km2. Untuk melihat luas daerah menurut Desa pada Kecamatan Bunguran Batubi dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.9

Luas Wilayah dan Tinggi Wilayah Menurut

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1.	Sedanau Timur	64,42	30,50
2.	Sedarat Baru	44,50	20,53
3.	Batubi Jaya	17,94	8,33
4.	Gunung Putri	68,72	32,08
5.	Semedang	18,87	8,56
Bunguran Batubi		214,45	100,00

3.2. Batas dan Peta Kerja

Dokumen sumber yang tersedia tidak cukup untuk menetapkan uraian batas utara, selatan, timur dan barat setiap desa secara legal. Batas tersebut tidak boleh dibuat berdasarkan perkiraan. Untuk profil final, gunakan peta administrasi resmi, peta bidang tanah, peta HPL, peta kawasan hutan dan peta delineasi kawasan transmigrasi.

3.3. Kedudukan dalam Struktur Pengembangan Kawasan

Dokumen perencanaan mengarahkan Desa Batubi Jaya (SP.1) sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan (PPK). PPK tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan kegiatan ketahanan pangan, peternakan, perkebunan dan industri yang sesuai dengan tata ruang, dengan Desa Gunung Putri dan Sedarat Baru sebagai kawasan pendukung.

3.4. Luas dan Batas: Catatan Penggunaan Angka

Luas sekitar 5.640,12 ha adalah angka total wilayah SKP.B dalam dokumen sumber, sedangkan angka 1.461 ha muncul dalam konteks pencadangan atau rencana pelepasan HPK. Angka-angka ini memiliki konteks berbeda dan tidak boleh dijumlahkan atau dipertukarkan tanpa memeriksa definisi, peta, serta status keputusan yang mendasarinya.

BAB IV. TOPOGRAFI, GEOLOGI, LANDFORM, DAN KONDISI TANAH

4.1.Topografi dan Kemiringan

Dokumen sumber menyatakan topografi lokasi transmigrasi SP.1, SP.2 dan SP.3 secara umum relatif datar dengan kemiringan sekitar 0–10 persen. Pada tabel kesesuaian lahan untuk beberapa lokasi Lahan Usaha II, kemiringan yang dicatat bervariasi dari 1–3 persen, 3–8 persen hingga 8–15 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya menggunakan data berdasarkan lokasi/blok, bukan satu angka umum untuk seluruh SKP.B.

Lokasi dalam dokumen	Luas (ha)	Kemiringan	Catatan penggunaan lahan
Lokasi 1 – Blok II Pelabuhan Batubi, SP.1 Batubi Jaya	228,4895	Landai 8–15%	Pertanian dan Perkebunan menurut tabel kesesuaian.
Lokasi 2 – Blok III Sungai Tengah dan Blok IV Sungai Curing (SP.1) serta Blok I Sungai Curing (SP.2)	870,9634	Agak datar 1–3%	Pertanian dan Perkebunan menurut tabel kesesuaian.

Lokasi 3 – Blok II Gunung Putri, SP.2	227,5627	Agak datar 1–3%; lereng Bukit Putri 8–15%	Pertanian dan Perkebunan menurut tabel kesesuaian.
Lokasi 4 – Blok I Semala dan Blok II Danau Putri, SP.3	133,9844	Agak landai 3–8%	Pertanian dan Perkebunan menurut tabel kesesuaian.

Catatan validasi: jumlah empat luasan pada tabel adalah 1.461,00 ha, sesuai luas pencadangan/pelepasan HPK 1.461 ha.

4.2. Landform dan Bahan Induk Tanah

Lokasi	Landform	Bahan induk yang dicatat
Lokasi 1 – Pelabuhan Batubi	Dataran vulkan	Basal dan gabro
Lokasi 2 – Sungai Tengah/Sungai Curing	Dataran aluvial	Endapan liat, pasir dan bahan organik
Lokasi 3 – Gunung Putri	Dataran aluvial	Endapan liat, pasir dan bahan organik
Lokasi 4 – Semala/Danau Putri	Dataran vulkan	Basal dan gabro

4.3. Jenis Tanah

Lokasi	Jenis tanah dalam dokumen	Implikasi awal dan kebutuhan verifikasi
Lokasi 1 – Pelabuhan Batubi	Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Aluvial Gleik	Variasi tanah dan kedalaman efektif perlu diuji; periksa drainase dan kedalaman tanah terutama pada area berlereng.
Lokasi 2 – Sungai Tengah/Sungai Curing	Regosol Humik, Organosol Saprik, Gleisol Eutrik	Perlu memeriksa tekstur, bahan organik, muka air tanah, lama genangan dan daya dukung lahan.
Lokasi 3 – Gunung Putri	Regosol Humik, Organosol Saprik, Gleisol Eutrik	Perlu membedakan zona datar dan lereng Bukit Putri; uji kesuburan dan drainase.
Lokasi 4 – Semala/Danau Putri	Kambisol Eutrik	Perlu uji kedalaman efektif, tekstur, pH, unsur hara dan drainase.

Nama jenis tanah pada tabel dipertahankan sesuai dokumen sumber. Uraian implikasi merupakan panduan pemeriksaan awal, bukan hasil laboratorium atau penetapan kesesuaian lahan per bidang.

4.4. Kondisi Tanah, Drainase, dan Pola Aliran

Dokumen sumber menggambarkan pola aliran air yang relatif lambat dan penampang sungai berupa tanah dengan sedikit batuan pada uraian topografi umum. Informasi ini perlu dipastikan melalui survei hidrologi lokal. Sumber tidak memberikan hasil uji laboratorium tanah per desa mengenai pH, tekstur rinci, kandungan hara, kedalaman efektif, kapasitas tukar kation, atau kejenuhan air.

4.5. Kesesuaian dan Pengelolaan Lahan

Berdasarkan tabel kesesuaian yang dilampirkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, lokasi-lokasi yang dibahas direncanakan untuk pengembangan pertanian dan sebagian dapat disesuaikan untuk perkebunan. Penetapan komoditas harus memperhatikan kondisi tanah aktual, kemiringan, ketersediaan air, status ruang, konservasi, dan akses pasar.

- Lahan datar dengan drainase memadai dapat dikaji untuk tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan hasil uji tanah dan ketersediaan air.
- Zona yang memiliki bahan organik tinggi atau kondisi basah perlu diperiksa muka air tanah dan risiko genangan sebelum ditetapkan sebagai lahan budidaya.
- Pada lahan dengan kemiringan 8–15 persen, praktik konservasi tanah dan pengendalian limpasan perlu menjadi bagian rencana pengelolaan.
- Sempadan sungai, area konservasi, dan area yang statusnya belum jelas tidak boleh diasumsikan sebagai lahan budidaya bebas pembatasan.

BAB V. IKLIM, HIDROLOGI, DAN SUMBER DAYA AIR

5.1. Iklim

Data iklim khusus untuk setiap desa SKP.B tidak dirinci dalam kutipan dokumen utama yang tersedia. Untuk profil final, gunakan publikasi Kecamatan Bunguran Batubi Dalam Angka 2025 dan data BMKG dengan mencantumkan stasiun pengamatan serta periode data. Variabel yang perlu disajikan adalah curah hujan bulanan, jumlah hari hujan, suhu, kelembapan, kecepatan angin dan penyinaran matahari.

5.2. Hidrologi dan Sungai

Dokumen menyebut nama lokasi dan blok yang terkait Sungai Curing serta adanya area konservasi sungai di sekitar Blok II Pelabuhan Batubi. Informasi lengkap mengenai jaringan sungai, batas DAS, mata air, debit, titik genangan dan kualitas air belum tersedia dalam sumber yang ditelaah. Pemetaan hidrologi lokal perlu dilakukan sebelum penetapan lokasi budidaya atau infrastruktur.

5.3. Bendung Tapau dan Rencana Irigasi

Dokumen sumber menyebut rencana saluran irigasi primer sayap kanan Bendung Tapau pada Blok II Pelabuhan Batubi. Sebagian lahan direncanakan untuk tanaman pangan lahan basah jika dapat dijangkau jaringan irigasi, sedangkan lahan yang tidak terlayani direncanakan untuk tanaman pangan lahan kering. Status pembangunan, trase, sumber pendanaan, debit, luas layanan, serta kondisi aktual saluran harus diverifikasi dengan instansi sumber daya air.

5.4. Perlindungan Sumber Daya Air

- Petakan sempadan sungai dan area konservasi pada peta kerja SKP.B.
- Inventarisasi lokasi banjir, genangan, kekeringan musiman, sedimentasi dan kerusakan drainase.
- Uji kualitas air yang digunakan untuk rumah tangga dan pertanian pada titik yang mewakili.
- Pastikan pembangunan saluran dan pengolahan lahan tidak mengganggu aliran alami atau area konservasi.

BAB VI. PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS PENGUASAAN TANAH

6.1. Pola Peruntukan Lahan Transmigran

Pola pembagian lahan yang disebut dalam dokumen adalah pekarangan 0,5 ha per KK, Lahan Usaha I 1 ha per KK, dan Lahan Usaha II 2 ha per KK. Untuk 1.060 KK, dokumen merekap 530 ha pekarangan, 1.060 ha Lahan Usaha I, dan 2.120 ha Lahan Usaha II.

6.2. Lahan Usaha II dan Status APL/HPK

Dokumen memuat angka 1.060 bidang Lahan Usaha II dengan luas total 2.120 ha. Tabel rekap menyebut 521 bidang/1.042 ha di APL dan 539 bidang/1.078 ha pada kategori yang disebut HPK. Di bagian lain dokumen, angka 1.461 ha disebut sebagai luas kawasan HPK yang menjadi objek penatausahaan pencadangan/pelepasan. Karena angka 1.078 ha, 1.461 ha dan jumlah luasan empat lokasi tidak sama, status dan definisi masing-masing angka perlu diperiksa melalui peta bidang dan dokumen keputusan resmi.

Data yang tercantum	Nilai	Langkah klarifikasi
Jumlah bidang LU II	1.060 bidang	Cocokkan dengan daftar nominatif dan peta bidang.
Total luas LU II pada rekap peruntukan	2.120 ha	Verifikasi luas per bidang dan luas efektif.
LU II yang dicatat dalam APL	521 bidang / 1.042 ha	Konfirmasi status ruang dan bidang pada data pertanahan terbaru.
LU II yang dicatat berada dalam HPK pada tabel rekap	539 bidang / 1.078 ha	Cocokkan dengan peta kawasan hutan dan status keputusan terkini.
Luas HPK yang disebut dalam narasi penatausahaan	1.461 ha	Pastikan apakah ini area pencadangan/pelepasan, bukan luas bidang LU II.
Jumlah luas 4 lokasi pada tabel teknis	1.465,0255 ha	Klarifikasi selisih 4,0255 ha dengan angka 1.461 ha.

6.3. Kondisi Fisik Lahan

Dokumen menyebut kondisi fisik sebagian Lahan Usaha II berupa kelapa sawit dan semak belukar. Pada area dekat sungai dan zona konservasi, terdapat hutan muda yang belum ditanami. Untuk Blok II Pelabuhan Batubi, dokumen menyatakan sebagian lahan dekat sungai merupakan area konservasi dan belum tersedia jalan lahan serta saluran drainase yang dapat menjadi akses petani. Kondisi ini adalah catatan historis dokumen dan harus diperiksa ulang melalui survei lapangan.

6.4. Sertifikasi dan Legalitas

Dokumen menyebut proses sertifikasi Lahan Usaha II mulai dilakukan sejak 2019 dan sebagian lahan memiliki kendala karena bersinggungan dengan kawasan HPK. Status sertifikat, bidang yang belum terbit, tumpang tindih, sengketa, dan dasar hukum penggunaan lahan perlu diperbarui bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dan instansi kehutanan. Penetapan rencana budidaya tidak menggantikan penyelesaian legalitas tanah.

6.5. Data Penggunaan Lahan yang Perlu Dipetakan

- Permukiman dan pekarangan.
- Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II per bidang.
- Perkebunan kelapa sawit, kebun campuran, sawah, hortikultura, dan lahan belum dimanfaatkan.
- Jalan utama, jalan lingkungan, jalan usaha tani, sungai, saluran irigasi dan drainase.
- Lahan aset transmigrasi, fasilitas umum, lahan ketahanan pangan, konservasi dan ruang terbuka hijau.
- Batas APL, HPK/kawasan hutan, HPL, sertifikat dan bidang yang sedang dalam proses legalisasi.

BAB VII. KEPENDUDUKAN, SOSIAL, DAN EKONOMI

7.1. Kependudukan

Dokumen utama menggambarkan kepadatan penduduk di wilayah SKP.B sebagai relatif rendah dan menyebut sebagian pecahan KK memilih tinggal di pusat perkotaan Ranai atau bekerja di luar kawasan karena peluang kerja dan kondisi

ekonomi. Pernyataan tersebut merupakan uraian dalam dokumen perencanaan dan perlu diperbarui menggunakan data administrasi kependudukan serta statistik resmi terbaru.

Untuk menghindari penggunaan angka lama sebagai data terkini, jumlah penduduk, KK, komposisi umur, jenis kelamin, pekerjaan, migrasi, dan rumah tangga tani per desa perlu diisi berdasarkan Kecamatan Bunguran Batubi Dalam Angka 2025 serta data pemerintah desa/Disdukcapil.

7.2. Kondisi Sosial dan Pelayanan Dasar

Sumber yang ditelaah belum menyediakan inventaris lengkap fasilitas sosial untuk tiap desa. Profil final perlu memuat jumlah dan kondisi sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor desa, air minum, sanitasi, persampahan, listrik, jaringan telekomunikasi, serta akses ke pusat layanan.

7.3. Mata Pencaharian dan Ekonomi Lokal

Dokumen mengaitkan perekonomian kawasan dengan pemanfaatan pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II, pertanian, perkebunan dan peternakan. Dokumen juga menyebut sebagian kebun kelapa sawit dinilai tidak produktif karena kendala pemasaran/pengolahan pada saat dokumen disusun. Kondisi terkini produktivitas, pola usaha, pendapatan, akses pasar, dan pengolahan hasil perlu diverifikasi.

7.4. Kelembagaan Ekonomi

Dokumen menyebut lahan ketahanan pangan di SP.2 Desa Gunung Putri seluas sekitar 169 ha dan sekitar 40 ha disebut telah dimanfaatkan untuk padi, palawija dan sayuran yang dikelola BUMDes pada saat data dihimpun. Status pengelolaan, luasan aktif, komoditas, produktivitas, kelembagaan, dan akses pasar perlu diperbarui sebelum dicantumkan sebagai kondisi terkini.

BAB VIII. PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN KETAHANAN PANGAN

8.1. Potensi Pengembangan

Dokumen rencana penggunaan lahan mengarahkan pengembangan kawasan untuk pertanian dan sebagian perkebunan, serta mengidentifikasi potensi peternakan dan industri yang sesuai tata ruang. Komoditas yang disebut dalam dokumen untuk Lahan Usaha I antara lain padi, kedelai, cabai dan sayur-sayuran. Pemilihan komoditas harus disesuaikan dengan hasil uji tanah, air, iklim, ketersediaan tenaga kerja, pasar dan status lahan.

8.2. Pengembangan Berdasarkan Kondisi Lokasi

Zona/lokasi	Arah pengembangan dalam dokumen	Prasyarat teknis
Blok II Pelabuhan Batubi, SP.1	Pertanian; sebagian tanaman pangan lahan basah jika terlayani irigasi, lahan lain untuk tanaman lahan kering.	Verifikasi status tanah, akses jalan, drainase, sempadan sungai dan rencana saluran irigasi.
Sungai Tengah/Sungai Curing, SP.1 dan SP.2	Pertanian dan perkebunan sesuai kondisi lahan.	Uji drainase, bahan organik, genangan, akses usaha tani dan status bidang.
Blok II Gunung Putri, SP.2	Pertanian dan perkebunan; zona lereng perlu perhatian khusus.	Konservasi tanah di lereng, uji tanah dan pemetaan batas area budidaya.
Semala/Danau Putri, SP.3	Pertanian; penggunaan spesifik ditetapkan setelah verifikasi lapangan.	Uji tanah, ketersediaan air, akses jalan dan status lahan.

8.3. Pengembangan Peternakan dan Industri

Dokumen mengarahkan PPK Batubi Jaya sebagai pusat yang berpotensi mendukung peternakan dan kegiatan industri. Rencana konkret perlu didukung kajian ketersediaan pakan, air, pengelolaan limbah, akses pasar, daya dukung lingkungan, zonasi, dan kepastian hak atas tanah.

8.4. Ketahanan Pangan

Pengembangan kawasan ketahanan pangan perlu menghubungkan ketersediaan lahan, jaringan irigasi, produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, kelembagaan petani, dan pasar. Data luas tanam/panen, produksi, produktivitas, kalender tanam, harga dan kebutuhan pangan lokal perlu dihimpun setiap musim.

BAB IX. SARANA, PRASARANA, DAN AKSESIBILITAS

9.1. Jalan dan Akses Lahan

Dokumen menyebut pada Blok II Pelabuhan Batubi tidak terdapat jalan lahan dan saluran drainase yang dapat digunakan sebagai akses petani. Kondisi tersebut perlu diverifikasi di lapangan. Inventarisasi seluruh jalan perlu mencatat panjang, lebar, jenis permukaan, kondisi, titik kerusakan, jembatan/gorong-gorong, akses musim hujan dan keterhubungan ke pusat pemasaran.

9.2. Irigasi dan Drainase

Rencana saluran primer sayap kanan Bendung Tapau disebut sebagai dukungan bagi pengembangan lahan pertanian. Profil final perlu memastikan status rencana dan realisasi, trase, panjang, debit, bangunan pembagi, jaringan sekunder/tersier, luas layanan dan kelembagaan pengelola air.

9.3. Sarana Pemerintahan dan Sosial

Data jumlah, kondisi, status kepemilikan, kapasitas dan kebutuhan rehabilitasi kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, balai pertemuan, pasar, gudang hasil pertanian dan sarana umum belum terinventarisasi lengkap dalam dokumen yang ditelaah. Setiap aset sebaiknya dilengkapi foto, koordinat, tahun pembangunan, kondisi fisik dan pengelola.

9.4. Telekomunikasi, Energi dan Air Bersih

Ketersediaan listrik, sinyal telekomunikasi, air minum dan sanitasi perlu diperbarui melalui survei desa dan data OPD/operator. Peta titik tanpa sinyal dan fasilitas dengan akses terbatas dapat digunakan sebagai dasar perbaikan layanan.

BAB X. POTENSI, PERMASALAHAN, DAN RISIKO

Aspek	Potensi atau modal dasar	Permasalahan/risiko yang perlu dikelola
Pertanian	Dokumen menyebut lahan yang direncanakan untuk pertanian dan hortikultura.	Produktivitas dan kondisi aktual lahan belum seluruhnya terukur; perlu uji tanah dan air.
Perkebunan	Sebagian lokasi memiliki tutupan kelapa sawit dan rencana perkebunan.	Produktivitas, akses pasar, dan kelayakan usaha perlu diperbarui.
Ketahanan pangan	Lahan ketahanan pangan di Gunung Putri dicatat sekitar 169 ha.	Luas aktif, pengelola, produksi, irigasi dan status terkini perlu verifikasi.
Irigasi	Ada rencana saluran primer yang berkaitan dengan Bendung Tapau.	Status realisasi, trase, debit dan luas layanan belum dipastikan.
Legalitas lahan	Terdapat riwayat pembagian lahan dan proses sertifikasi LU II.	Angka APL/HPK dan luas lokasi berbeda antarbagian dokumen; berisiko menimbulkan salah tafsir.
Infrastruktur	Ada pusat pertumbuhan yang direncanakan di Batubi Jaya.	Akses jalan lahan dan drainase pada blok tertentu dilaporkan belum tersedia dalam dokumen historis.
Lingkungan	Variasi dataran aluvial dan vulkan memungkinkan pengembangan berbeda per lokasi.	Area dekat sungai/konservasi, genangan, dan lereng memerlukan pembatasan serta pengelolaan sesuai kondisi.

10.1. Risiko Data dan Perencanaan

- Penggunaan angka luas tanpa menyamakan definisi dan batas poligon.
- Penetapan status APL/HPK hanya berdasarkan dokumen lama tanpa peta dan keputusan terbaru.
- Rekomendasi komoditas berdasarkan nama jenis tanah saja tanpa uji lapangan.

- Pembangunan irigasi atau jalan tanpa memastikan status lahan, kebutuhan teknis, dan dampak lingkungan.
- Penggunaan data penduduk dan infrastruktur lama sebagai gambaran kondisi saat ini.

BAB XI. ARAHAN PENGEMBANGAN DAN REKOMENDASI

11.1. Jangka Pendek

1. Menyepakati satu peta kerja SKP.B yang menampilkan batas desa, batas kawasan, blok SP, Lahan Usaha I/II, HPL, APL, HPK/kawasan hutan, sungai, jalan, irigasi dan aset.
2. Menyelaraskan angka luas 1.461 ha, 1.078 ha, dan total empat lokasi 1.465,0255 ha berdasarkan peta poligon dan dokumen resmi.
3. Memutakhirkan status sertifikat setiap bidang bersama Kantor Pertanahan dan pemerintah desa.
4. Melakukan survei cepat kondisi jalan usaha tani, drainase, sungai, saluran irigasi dan area konservasi.
5. Menghimpun data penduduk, fasilitas umum, komoditas, kelompok tani dan kelembagaan ekonomi terkini.

11.2. Jangka Menengah

1. Melaksanakan pengujian tanah representatif untuk pH, tekstur, bahan organik, unsur hara, kedalaman efektif dan drainase.
2. Menyusun peta kemiringan, jenis tanah, penggunaan lahan dan kesesuaian komoditas berdasarkan unit lahan.
3. Menyusun rencana rehabilitasi atau pembangunan irigasi berdasarkan audit teknis dan status lahan.
4. Mengembangkan pusat data spasial dan nonspasial yang diperbarui secara berkala.
5. Menyusun rencana usaha tani dan rantai pasok yang menghubungkan produksi, pascapanen, pengolahan dan pasar.

11.3. Prinsip Pengelolaan

- Berbasis data resmi dan verifikasi lapangan.
- Memisahkan batas administrasi, batas kawasan transmigrasi, batas HPL, batas bidang dan status kawasan hutan.
- Mengutamakan konservasi tanah dan air serta perlindungan sempadan sungai.

- Melibatkan pemerintah desa, masyarakat, kelompok tani dan instansi teknis.
- Memutakhirkan data dengan mencantumkan sumber, tahun, definisi, skala dan penanggung jawab.

BAB XII. DATA YANG PERLU DILENGKAPI DAN DIVERIFIKASI

No.	Data	Rincian minimum	Instansi/sumber yang disarankan
1	Batas dan luas	Batas desa, batas SKP.B, blok SP, luas poligon, koordinat dan sistem referensi.	Bappeda, Bagian Pemerintahan, desa, instansi geospasial.
2	Pertanahan	Daftar bidang, NIB, sertifikat, HPL, status APL/HPK, sengketa dan overlap.	Kantor Pertanahan, Disnakertrans, instansi kehutanan.
3	Topografi	DEM, elevasi, kelas lereng, titik rawan erosi/genangan.	PUPR/Bappeda dan sumber geospasial resmi.
4	Tanah	Jenis tanah, tekstur, pH, bahan organik, unsur hara, kedalaman efektif dan drainase.	Dinas Pertanian/laboratorium tanah.
5	Iklim	Curah hujan bulanan, hari hujan, suhu, kelembapan, sumber stasiun dan periode.	BMKG dan BPS.
6	Hidrologi	Sungai, DAS, debit, genangan, mata air, kualitas air dan sempadan.	PUPR, DLH, instansi sumber daya air.
7	Irigasi	Status rencana/realisasi, panjang saluran, debit, luas layanan, kerusakan dan pengelola.	PUPR/BWS dan kelompok pengguna air.
8	Penggunaan lahan	Permukiman, kebun, sawah, hortikultura, semak, hutan muda, konservasi dan aset.	Desa, OPD teknis, survei dan citra.
9	Penduduk	Penduduk/KK per desa, umur, pekerjaan, rumah tangga tani dan migrasi.	BPS, Disdukcapil, pemerintah desa.
10	Pertanian	Luas tanam/panen, produksi, produktivitas, komoditas, harga, kelompok tani.	Dinas Pertanian, penyuluh, BPS.
11	Infrastruktur	Jalan, jembatan, drainase, sekolah, kesehatan, listrik, telekomunikasi, air dan sanitasi.	OPD teknis dan pemerintah desa.
12	Lingkungan	Area konservasi, sempadan sungai, erosi, genangan, kualitas air dan titik pencemaran.	DLH, PUPR, BPBD dan desa.

Metadata Minimum

Setiap dataset perlu mencantumkan nama data, definisi, cakupan geografis, tahun/periode, sumber, metode, skala/resolusi, sistem koordinat untuk data spasial, tanggal pembaruan, penanggung jawab, status validasi dan catatan keterbatasan.

BAB. XIII. PENUTUP

SKP.B Bunguran Batubi memiliki basis lahan yang dalam dokumen perencanaan diarahkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan penguatan ketahanan pangan, dengan Desa Batubi Jaya sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan. Pengembangan yang terarah memerlukan satu peta dasar yang tervalidasi, kepastian status bidang, pemeriksaan kesesuaian tanah dan air, pemutakhiran kondisi infrastruktur serta data sosial-ekonomi. Profil ini merupakan draf awal dan perlu dilengkapi verifikasi teknis sebelum digunakan sebagai dokumen resmi.

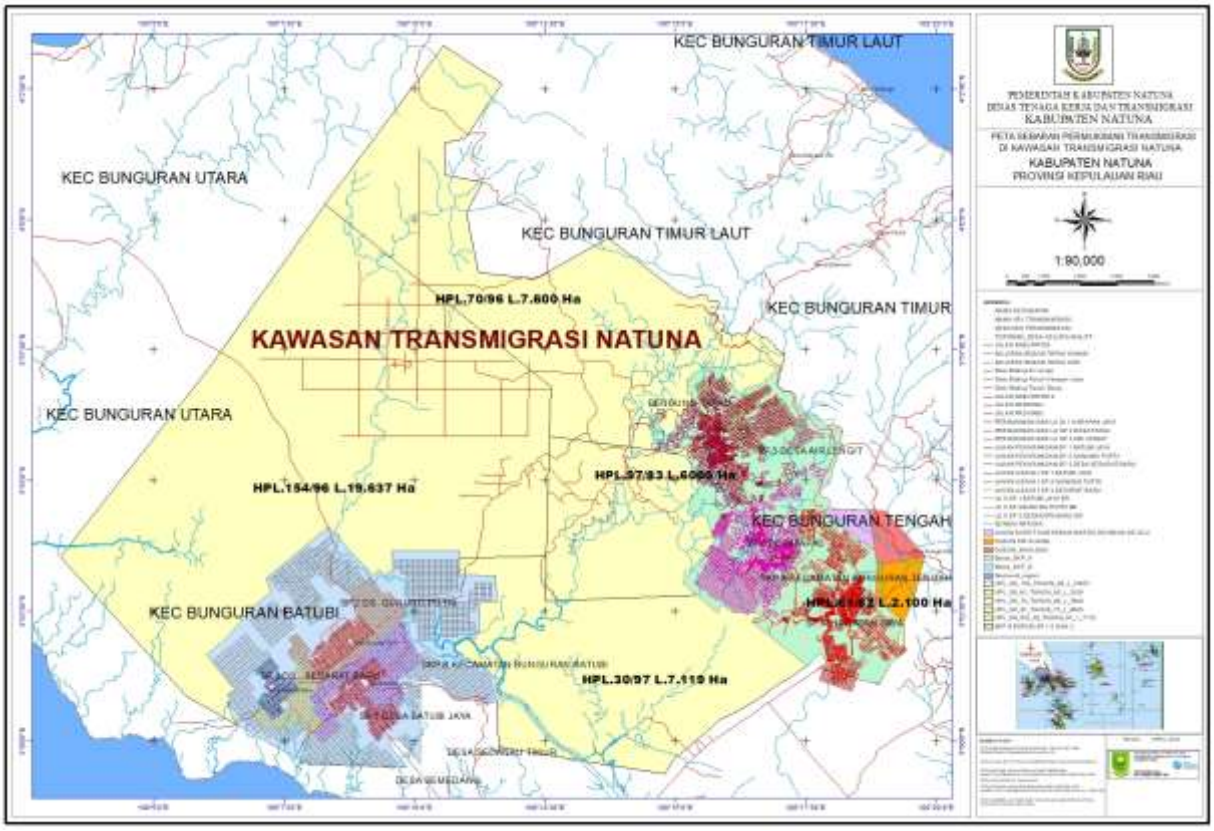
DAFTAR SUMBER

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Rencana Penggunaan Lahan Usaha II Transmigran SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3 Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau oleh Kartono, SE, Kepala Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial Tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Kecamatan Bunguran Batubi Dalam Angka 2025. Publikasi dirilis 26 September 2025.
- Lampiran Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Nomor 500.6/04/DKPP-UP1/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang data/rencana penggunaan lahan usaha II, kesesuaian lahan dan arah pengembangan.
- Seluruh data status bidang, batas, iklim, kependudukan, infrastruktur dan kondisi aktual harus dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang sebelum penetapan dokumen.

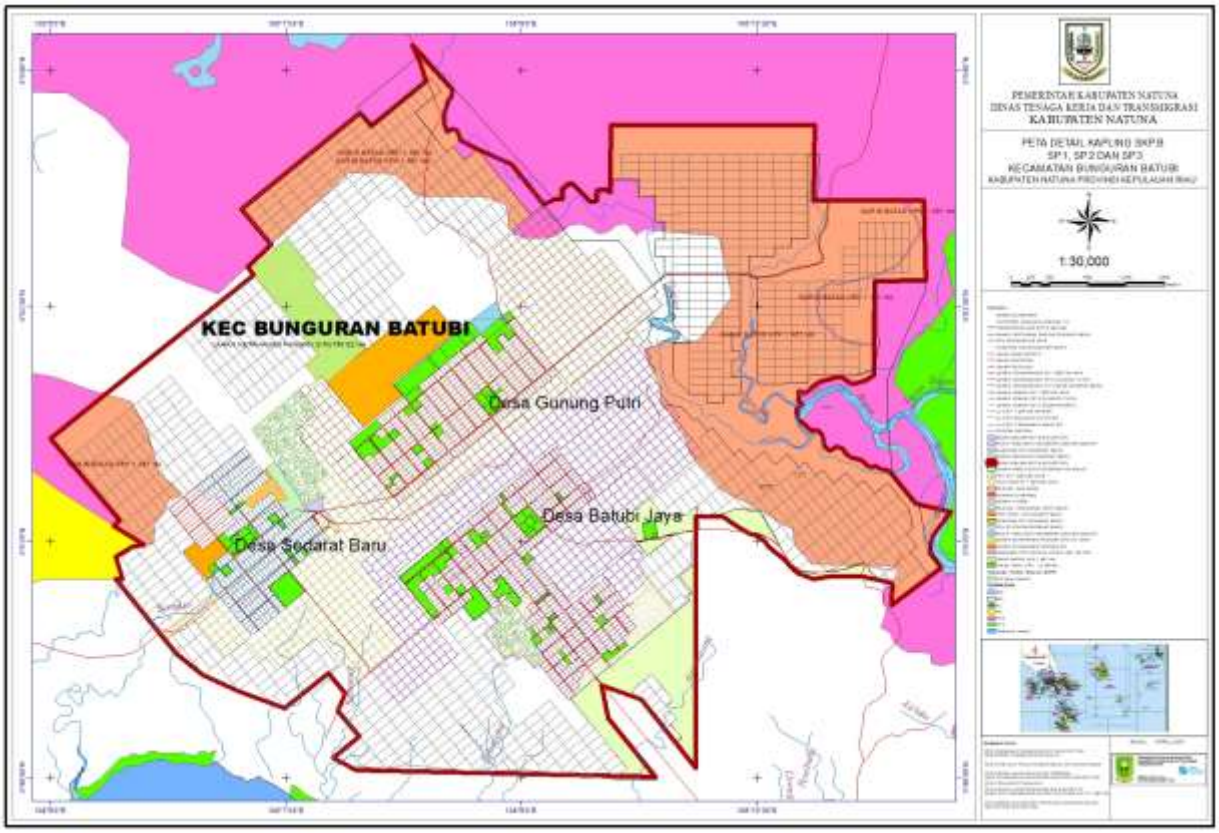
Ranai, 05 Oktober 2025
Kepala Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial
Peserta PKA XII BPSDM Kepri Tahun 2025

Kartono, SE
NIP.197211152006041009

PETA SEBARAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI



PETA KAPLING SKP.B BUNGURAN BATUBI SP.1, SP.2 DAN SP.3



KONDISI LAHAN USAHA

Kondisi Lahan Usaha I yang sudah digarap untuk pengembangan Tanaman Pangan










Kondisi Lahan Usaha II masih belum digarap





